



**BUPATI KEPULAUAN MERANTI
PROVINSI RIAU**

**KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI
NOMOR : 110 /HK/KPTS/III/2021**

T E N T A N G

**PENETAPAN DESA LOKASI FOKUS PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
ANAK Kerdil (STUNTING)
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2022**

- Menimbang :
- a. bahwa kasus Anak Kerdil (Stunting) pada Balita di Kabupaten Kepulauan Meranti, cukup tinggi. Dikhawatirkan akan berpengaruh buruk dan menghambat upaya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat serta pembangunan sumber daya manusia. Sehingga perlu ditetapkan desa Lokasi Fokus pencegahan dan penangggulangan *Stunting* di Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2022;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, sebagaimana tersebut dalam telaah Staf Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor: 0.50/BAPPEDA-III/2021 tanggal 23 Januari 2021, dipandang perlu ditetapkan dalam Keputusan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Desa Lokasi Fokus Pencegahan dan Penanggulangan Anak Kerdil (Stunting) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2022.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
 5. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52911);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
10. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013 tentang Kecukupan Gizi Bagi Anak Bangsa;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan gizi;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Standar Kapsul Vitamin A bagi Bayi, Anak Balita dan Ibu Nifas;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
19. Tentang Perubahan Atas Peraturuan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-664 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Kepulauan Meranti Provinsi Riau;
21. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 03 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2019;
 23. Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 86 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2018 Nomor 86).
 24. Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 75 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan meranti Tahun 2018 Nomor 75);
 25. Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 76 Tahun 2018 Tentang pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019; (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2018 Nomor 76);
 26. Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 80 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabuapten Kepulauan Meranti Tahun 2018 Nomor 80);
 27. Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 81 Tahun 2018 Tentang Mekanisme Penyaluran Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah kabuapten Kepulauan Meranti tahun 2018 Nomor 81);
 28. Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pedoman Percepatan Pencegahan Stunting Terintegrasi);
 29. Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 42 Tahun 2020 tentang Tata Cara Konvergensi Pencegahan dan Penanggulangan Stunting di desa);
- Memperhatikan : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI TENTANG PENETAPAN DESA LOKASI FOKUS PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN ANAK KERDIL (STUNTING) KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2022.**
- KESATU : Menetapkan Desa Lokasi Fokus Pencegahan dan Penanggulangan Anak Kerdil (Stunting) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Desa-desa Lokasi Fokus Pencegahan dan Penanggulangan *Stunting* yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati ini, akan dibina dan ditanggulangi bersama oleh Tim Koordinasi Percepatan Pencegahan dan Penurunan Anak Kerdi (Stunting) Kabupaten Kepulauan Meranti, dan pihak-pihak terkait lainnya, sehingga tercapai target penurunan *Stunting* tahun 2022.

KETIGA

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan

Ditetapkan : di Selatpanjang
Pada tanggal :

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes that form a stylized, somewhat abstract shape.

IRWAN

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI
 NOMOR : 110 /HK/KPTS/ II /2021
 TENTANG
 SUSUNAN DESA LOKASI FOKUS PENCEGAHAN DAN
 PENANGGULANGAN ANAK Kerdil (STUNTING)
 KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2022

**SUSUNAN DESA LOKASI FOKUS PENCEGAHAN DAN
 PENANGGULANGAN ANAK Kerdil (STUNTING)
 KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2022**

NO.	DESA/KELURAHAN	PUSKESMAS	KECAMATAN
1	2	3	4
1.	Tanjung Sari	Sungai Tohor	Tebing Tinggi Timur
2.	Kepau Baru	Sungai Tohor	Tebing Tinggi Timur
3.	Alai Selatan	Alai	Tebing Tinggi Barat
4.	Baran Melintang	Pulau Merbau	Pulau Merbau
5.	Maini Darul Aman	Alai	Tebing Tinggi Barat
6.	Sendanu Darul Ihsan	Sungai Tohor	Tebing Tinggi Timur
7.	Pelantai	Teluk Belitung	Merbau
8.	Gemala sari	Tanjung Samak	Rangsang
9.	Kundur	Alai	Tebing Tinggi Barat
10.	Nipah Sendanu	Sungai Tohor	Tebing Tinggi Timur
11.	Tanjung Pisang	Bandul	Tasik Putri Puyu
12.	Mekong	Alai	Tebing Tinggi Barat
13.	Batang Meranti	Pulau Merbau	Pulau Merbau
14.	Penyagun	Kedabu Rapat	Rangsang Pesisir
15.	Pangkalan Balai	Pulau Merbau	Pulau Merbau
16.	Telaga baru	Anak Setatah	Rangsang Barat
17.	Lemang	Anak Setatah	Rangsang Barat
18.	Sungai Tohor	Sungai Tohor	Tebing Tinggi Timur
19.	Bungur	Kedabu Rapat	Rangsang pesisir
20.	Dwi Tunggal	Tanjung Samak	Rangsang
21.	Teluk Samak	Tanjung Samak	Rangsang
22.	Mengkopot	Bandul	Tasik Putri Puyu
23.	Sesap	Alah Air	Tebing Tinggi
24.	Bandul	Bandul	Tasik Putri Puyu
25.	Banglas Barat	Alah Air	Tebing Tinggi

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,



IRWAN